



PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



dan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI
Tentang
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DALAM
BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN (BKP)

NOMOR : 23.2.5/UN32.7.5.2/DN/2023
NOMOR : 188/753/429.110/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (23-02-2023), bertempat di Kantor Geopark Ijen Banyuwangi, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut **Perjanjian**) oleh dan antara:

- I. **Dr. Purwanto, M.Si.**, Ketua Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kordinator Program Studi S1 Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, dengan alamat Jalan Semarang No 5, Kota Malang, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **M. Y. Bramuda, S.Sos., MBA., MM.**, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan Jalan Jenderal Ahmad Yani No 78, Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Indonesia yang selanjutnya **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK PERTAMA**, yaitu Kordinator Program Studi S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
- b. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dalam implementasi kegiatan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Kegiatan penyelenggaraan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) sebagai mana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini bersifat "*partisipatif*" dan **PARA PIHAK** bekerja sama untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing agar tercapainya tujuan kerja sama.
- (2) Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) yang akan dilaksanakan diinisiasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PARA PIHAK** bersepakat bekerja-sama untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan dan hanya terikat pada hak dan kewajiban yang tertulis dalam Perjanjian ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) dengan membangun nilai-nilai profesionalisme, kejujuran, tanggung jawab, kesetaraan, anti korupsi dan kreativitas.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) akan dibicarakan kemudian melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, dengan melihat situasi dan kondisi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban mensukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
 - b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.
- (4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sumber daya manusia yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa (jika terlibat) sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan rapat atau pertemuan atau kordinasi jika diperlukan.
- (5) **PARA PIHAK** menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PASAL 4
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini berakhir apabila telah memenuhi batas waktu perjanjian kerja sama sesuai yang tertulis pada ayat (1) di pasal ini.
- (3) Keputusan apapun untuk menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka harus mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian setiap kegiatan yang sedang berlangsung.

PASAL 5
BIAYA

- (1) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan sebagai akibat Perjanjian ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari **PARA PIHAK**, sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat berupaya mencari kemungkinan sumber pembiayaan lain yang legal, dan disepakati bersama apa yang menjadi konsekuensi yang ditimbulkannya sebagai syarat dari pihak pemberi dana atau pihak ketiga.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam suatu dokumen kegiatan bersama sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 6
KORESPONDENSI DAN PELAKSANA KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Kordinator Program Studi S1 Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**

Nama : Dr. Purwanto, M.Si
Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang
Telepon : 0812 1609 9950
Email : purwanto.fis@um.ac.id

PIHAK KEDUA : **Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi**

Nama : M. Y. Bramuda, S.Sos., MBA., MM.
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No 78, Taman Baru,
Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.
Telepon : (0333) 424172
Email : bwitourism1@gmail.com

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA


- (2) Perubahan pelaksana kegiatan atau alamat **PARA PIHAK** dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya. Perubahan tersebut tidak membuat Perjanjian ini batal atau berakhir dan hanya sebagai dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** terkait dalam Kerjasama ini tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hura, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** terkait Kerjasama ini yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya sepuluh (10) hari kerja sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) Force majeure sebagaimana dimaksud dalam PASAL ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap perubahan pada Perjanjian ini, wajib dilakukan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang secara sah ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

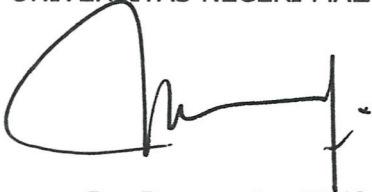
PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA


PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur tersendiri secara tertulis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing satu rangkap asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PRODI S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Purwanto, M.Si
NIP. 197807012008121003

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI



M. Y. Bramuda, S.Sos., MBA., MM
NIP. 197301261992011001

Mengetahui:
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP. 196212041987011001

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA
